

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk.
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN
USAHA
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17/POJK.04/2020
("Keterbukaan Informasi")**



Teknologi Karya Digital Nusa

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Berkedudukan di Jakarta , Indonesia
(**"Perseroan"**)

Kegiatan Usaha:

Perusahaan yang menyediakan solusi sistem informasi teknologi, dengan fokus utama pada Transport Management Solutions yang memanfaatkan teknologi telematika dan Internet of Things (IoT).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI- SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

Jakarta, 12 Februari 2026

Kantor Pusat

Gedung

TKDN, Tbk

Jl. Sunter Muara No. 8A, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14350

Tel. 021 38889045

Website : www.tkdn.co.id

Email : corporate.secretary@tkdn.co.id

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (c) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), dimana Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai rencana penambahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB").

Keterbukaan Informasi memuat rencana Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu penambahan kegiatan usaha :

1. KBLI 2025 No. 35132 berupa Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik
2. KBLI 2025 No. 35133 berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan menyatakan bahwa setelah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), Perseroan akan melanjutkan proses untuk memperoleh seluruh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan/atau pemberitahuan yang diperlukan kepada instansi atau otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Penambahan Kegiatan Usaha tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan dan memenuhi seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang perizinan berusaha dan peraturan sektoral terkait lainnya.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pihak-pihak tertentu, baik pemegang saham maupun pihak lainnya, yang menyampaikan keberatan terhadap rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham agar memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan memadai mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. Keterbukaan Informasi ini sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham dalam memberikan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan.

II. Keterangan Mengenai Perseroan atau Uraian Singkat Perseroan

1. Profil Singkat Perseroan

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TKDN Tbk), dengan kode saham TRON, merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada solusi digitalisasi transportasi dan manajemen armada. IPO pada tanggal 8 Maret 2023 perusahaan ini menyediakan layanan seperti *Fleet Management System* (FMS), *IoT Smart Bus*, serta pengembangan teknologi untuk logistik dan pertambangan. TKDN Tbk merencanakan ekspansi ke solusi energi terbarukan, khususnya *Battery as a Service* (BAAS), dengan memanfaatkan teknologi AI untuk optimalisasi sumber daya energi. Ekspansi ini mencakup pengembangan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna mendukung infrastruktur kendaraan listrik dan percepatan *net zero emission* di Indonesia.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

a. Akta yang mendasari struktur permodalan Perseroan:

- Akta Pendirian : Akta Nomor 25 tertanggal 7 Januari 2011
- Akta Perubahan : Akta Nomor 01 tertanggal 27 Maret 2017
- Akta Perubahan : Akta Nomor 44 tertanggal 28 Desember 2020
- Akta Perubahan : Akta Nomor 103 tertanggal 22 Maret 2022
- Akta Perubahan : Akta Nomor 154 tertanggal 27 April 2022
- Akta Perubahan : Akta Nomor 110 tertanggal 28 September 2022
- Akta Perubahan : Akta Nomor 53 tertanggal 13 Maret 2025

b. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terkini berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Komposisi Kepemilikan Saham
(Atas Dasar Daftar Pemegang Saham Per 31 Desember 2025)

Keterangan Pemegang Saham	Jumlah Saham (Per 30 Nov 2025)	Konversi (Per 31 Des 2025)	Exercise Warrant (Per 31 Des 2025)	Jumlah Saham (Per 31 Des 2025)	Persentase Saham	Nilai Nominal (Rp.20./saham) (Rp.)
A. Saham dengan Sertifikat Kolektif						
A.1. Pemegang Saham Pendiri						
- David Santoso	3.168.000	0	0	3.168.000	0,11%	63.360.000
- Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	0	0	1.232.000	0,04%	24.640.000
Sub Total A.1 :	4.400.000	0	0	4.400.000	0,15%	88.000.000
A.2. Masyarakat						
A.2.1. Pemodal Nasional						
>=5%	0	0	0	0	0,00%	0
Lainnya	0	0	0	0	0,00%	0
Sub Total A.2.1 :	0	0	0	0	0,00%	0
A.2.2. Pemodal Asing						
>=5%	0	0	0	0	0,00%	0
Lainnya	0	0	0	0	0,00%	0
Sub Total A.2.2 :	0	0	0	0	0,00%	0
Sub Total A.2 :	0	0	0	0	0,00%	0
Total (A) :	4.400.000	0	0	4.400.000	0,15%	88.000.000
B. Saham Dalam Penitipan Kolektif PT KSEI						
B.1. Pemegang Saham Pendiri						
- David Santoso	1.600	0	0	1.600	0,00%	32.000
- Daya Kemilau Nusantara Investama, PT	1.764.046.400	0	0	1.764.046.400	59,77%	35.280.928.000
- Rudy Budiman Setiawan	0	0	0	33.600	0,00%	672.000
Sub Total B.1 :	1.764.048.000	0	0	1.764.081.600	59,77%	35.281.632.000
B.2. Masyarakat						
B.2.1. Pemodal Nasional						
>=5%	0	0	0	0	0,00%	0
Lainnya	1.036.990.448	0	0	1.030.470.148	34,92%	20.609.402.960
Sub Total B.2.1 :	1.036.990.448	0	0	1.030.470.148	34,92%	20.609.402.960
B.2.2. Pemodal Asing						
>=5%	0	0	0	0	0,00%	0
Lainnya	145.890.000	0	0	152.376.700	5,16%	3.047.534.000
Sub Total B.2.2 :	145.890.000	0	0	152.376.700	5,16%	3.047.534.000
Sub Total B.2 :	1.182.880.448	0	0	1.182.846.848	40,08%	23.656.936.960
Total (B) :	2.946.928.448	0	0	2.946.928.448	99,85%	58.938.568.960
Total Saham (A+B) :	2.951.328.448	0	0	2.951.328.448	100,00%	59.026.568.960

Jakarta, 31 Desember 2025


Andry
Direktur

c. Pengendali dan Pemilik Manfaat

- Nama Pengendali Perseroan : PT Daya Kemilau Nusantara Investama
- Nama Pemilik Manfaat : David Santoso

d. Saham Treasuri

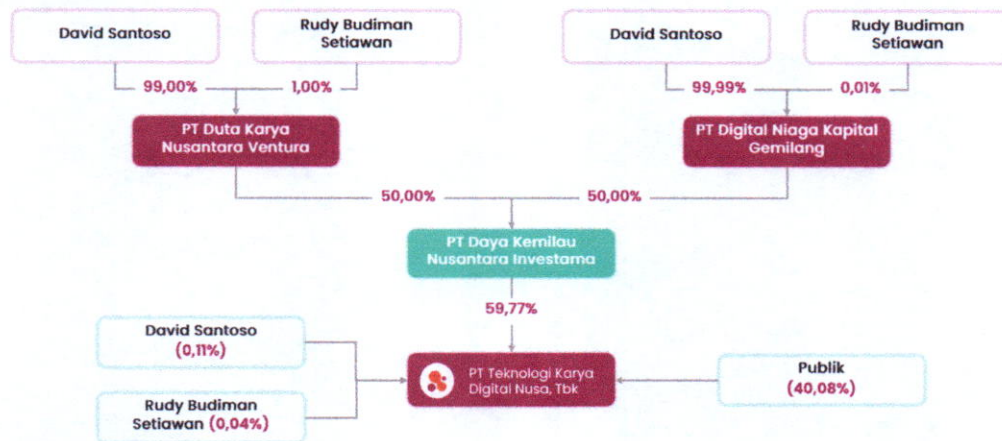
Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasuri.

e. Struktur kepemilikan Perseroan

Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham dan Perusahaan

Per 31 Januari 2026

 Teknologi Karya Digital Nusa



©1823M | Proprietary & Confidential

3. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris:

Direksi		
Direktur Utama	:	David Santoso
Direktur	:	Rudy Budiman Setiawan
Direktur	:	Wendy Jolanda Waas
Direktur	:	Sultan Satria
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Mirzha Whibowo
Komisaris	:	Drs. Thomson E Batubara
Komisaris Independen	:	Noerman Taufik

- Akta yang mendasari penetapan anggota Direksi dan Komisaris adalah Akta Nomor 80 Tanggal 25 Juni 2025.
- Masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris adalah selama 5 Tahun.

4. Pengungkapan terkait Ringkasan Ikhtisar Keuangan Penting untuk periode terkini dibandingkan periode sebelumnya, antara lain:

a. Ringkasan Laporan Posisi Keuangan

PT Teknologi Karya Digital Nusa
Financial Statement
September 30, 2025

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION					
	30 September / Sep 30 2025	31 Desember / Dec 31 2024	Inc / (Dec)	%	
A S E T S					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	111.574.892	5.134.673.575	(5.023.098.683)	-98%	
Piutang usaha	83.740.357.093	51.720.483.583	32.019.873.510	62%	
Pihak ketiga - neto	83.740.357.093	51.720.483.583	32.019.873.510	62%	
Piutang lain-lain	442.236.555	295.988.407	146.248.148	49%	
Pihak ketiga - neto	442.236.555	295.988.407	146.248.148	49%	
Persediaan	21.513.572.550	30.942.985.723	(9.429.413.173)	-30%	
Pajak dibayar di muka	8.355.708.321	4.928.548.909	3.427.159.412	70%	
Uang muka	10.800.942.805	20.121.254.054	(9.320.311.249)	-46%	
Pihak ketiga	10.800.942.805	20.121.254.054	(9.320.311.249)	-46%	
Aset lancar lainnya	10.057.235.281	30.584.267	10.026.651.014	32784%	
Jumlah Aset Lancar	135.021.627.497	113.174.518.518			
Aset Tidak Lancar					
Aset pajak tangguhan	1.112.241.143	1.112.241.143	-	0%	
Uang muka	25.511.114.244	32.934.839.298	(7.423.725.054)	-23%	
Investasi pada entitas asosiasi	1.335.613.587	1.828.380.712	(492.767.125)	-27%	
Aset hak-guna - neto	192.333.328	58.666.660	133.666.668	228%	
Aset takberwujud - neto	51.399.165.583	81.308.766.573	(29.909.600.990)	-37%	
Aset tetap - neto	43.746.628.118	44.989.086.311	(1.242.458.193)	-3%	
Properti investasi	7.772.004.168	7.814.430.951	(42.426.783)	-1%	
Jumlah Aset Tidak Lancar	131.069.100.171	170.046.411.648			
JUMLAH ASET	266.090.727.669	283.220.930.166			
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Pinjaman bank jangka pendek	19.826.054.427	24.962.126.083	(5.136.071.656)	-21%	
Utang usaha	14.032.107.268	5.591.530.921	8.440.576.347	151%	
Utang lain-lain	40.700.000	3.134.094.046	(3.093.394.046)	-99%	
Liabilitas kontrak	1.390.676.965	1.110.339.554	280.337.411	25%	
Beban masih harus dibayar	6.126.568.337	1.528.510.470	4.598.057.867	301%	
Utang pajak	11.369.332.622	5.008.322.180	6.361.010.442	127%	
Utang jangka panjang - bagian jangka pendek	6.800.243.377	3.743.077.778	3.057.165.599	82%	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	59.585.682.996	45.078.001.032			
Liabilitas Jangka Panjang					
Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo lebih dari satu tahun	16.137.812.492	16.137.812.492	-	0%	
Bagian jangka panjang pinjaman lembaga keuangan	101.155.101	159.014.377	(57.859.276)	-36%	
Liabilitas imbalan kerja	2.104.852.735	2.104.852.735	-	0%	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	18.343.820.328	18.401.679.604			
JUMLAH LIABILITAS	77.929.503.324	63.479.680.636			
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal					
Rp20 per saham					
Modal dasar					
6.000.000.000 lembar saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh -					
2.950.000.000					
lembar saham	59.026.568.960	59.000.000.000	26.568.960	0%	
Tambahan modal disetor	115.158.855.407	114.853.424.867	305.430.540	0%	
Uang muka pelaksanaan waran	-	325.202.750	(325.202.750)	-100%	
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	22.600.000.000	22.600.000.000	-	0%	
Belum ditentukan penggunaannya	-14.188.375.848	16.837.503.802	(31.025.879.650)	-184%	
Penghasilan komprehensif lain	654.531.075	654.531.075	-	0%	
Ekuitas yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas	183.251.579.594	214.270.662.494	(31.019.082.900)	-14%	
Induk					
Kepentingan non pengendali	4.909.644.750	5.470.587.036	(560.942.286)	-10%	
JUMLAH EKUITAS	188.161.224.344	219.741.249.530			
JUMLAH LIABILITAS AND EQUITY	266.090.727.669	283.220.930.166			

b. Ringkasan Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain;

PT Teknologi Karya Digital Nusa
Financial Statement
September 30, 2025

	STATEMENT OF PROFIT OR LOSS		Inc (Des)	%
	30 September / Sep 30 2025	30 September / Sep 30 2024		
PENDAPATAN	59.389.114.593	117.696.124.352	(58.307.009.759)	-50%
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(55.050.783.810)	(92.163.688.383)	37.112.904.573	-40%
LABA KOTOR	4.338.330.783	25.532.435.969	(21.194.105.186)	-83%
Beban penjualan	(237.730.489)	(636.273.821)	398.543.332	-63%
Beban umum dan administrasi	(16.951.413.434)	(13.999.809.399)	(2.951.604.035)	21%
Beban keuangan	(1.765.307.004)	(2.586.587.992)	821.280.988	-32%
Pendapatan lain-lain	9.652.570	709.927.094	(700.274.524)	-98%
Beban lain-lain - neto	(16.980.354.363)	(1.000.623.077)	(15.979.731.286)	1597%
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAK) PAJAK PENGHASILAN	(31.586.821.937)	8.019.068.774	(39.605.890.711)	-494%
Manfaat (beban) pajak penghasilan				
Kini	-	-		
Tangguhan	-	-		
Jumlah beban pajak penghasilan	-	-		
LABA TAHUN BERJALAN	(31.586.821.937)	8.019.068.774	(39.605.890.711)	-494%
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	-	-		
Pajak penghasilan terkait	-	-		
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	-		
BERJALAN	(31.586.821.937)	8.019.068.774	(39.605.890.711)	-494%
Laba neto yang diatribukan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(31.025.879.650)	-	(31.025.879.650)	#DIV/0!
Kepentingan nonpengendali	(560.942.286)	-	(560.942.286)	#DIV/0!
Jumlah	(31.586.821.937)	8.019.068.774	(39.605.890.711)	-494%
Penghasilan komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(31.025.879.650)	-	(31.025.879.650)	#DIV/0!
Kepentingan nonpengendali	(560.942.286)	-	(560.942.286)	#DIV/0!
Jumlah	(31.586.821.937)	8.019.068.774	(39.605.890.711)	-494%
LABA PER SAHAM DASAR	-10,70	2,97		
LABA PER SAHAM DILUSIAN	-10,70	2,97		

c. Ringkasan Laporan Arus Kas

STATEMENTS OF CASH FLOW (DIRECT)				
	30 September/September 30 2025	30 September/September 30 2024	Inc (Des)	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	36.689.552.332	97.419.658.721	(60.730.306.389)	-62%
Pembayaran kas untuk operasional	(37.180.794.290)	(84.981.934.521)	47.801.140.232	-56%
Penerimaan dari pendapatan bunga	136.756.737	448.301.307	(311.544.570)	-69%
Pembayaran beban keuangan	(1.765.307.004)	(2.586.587.932)	821.280.988	-32%
Pembayaran gaji dan tunjangan	(6.103.718.396)	(8.705.717.596)	2.601.999.200	-30%
Pembayaran pajak penghasilan badan	-	(397.359.588)	397.359.588	-100%
Pembayaran umum dan administrasi	(6.515.309.153)	(880.370.683)	(5.634.938.470)	640%
Penerimaan (pembayaran) kas lainnya	(23.117.592.002)	-	(23.117.592.002)	#DIV/0!
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(37.856.411.775)	316.189.648	(38.172.601.423)	-12073%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset hak guna	(133.666.668)	-	(133.666.668)	#DIV/0!
Penghapusan (Perolehan) aset takberwujud	29.909.600.990	(20.326.025.000)	50.235.625.990	-247%
Aset lainnya	492.767.125	-	492.767.125	#DIV/0!
Penjualan (Perolehan) aset tetap	1.242.458.193	(1.655.173.846)	2.897.632.039	-175%
Penjualan aset tetap	127.104.167	-	127.104.167	#DIV/0!
Realisasi (pembayaran) uang muka aset tetap dan software	7.466.151.838	(6.980.431.496)	14.446.583.334	-207%
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	39.104.415.645	(28.961.630.342)	68.066.045.987	-235%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan piutang lain-lain - Pihak berelasi	(146.248.148)	(1.514.133.169)	1.367.885.021	-90%
Pembayaran utang bank	(5.293.968.556)	(738.000.000)	(4.555.968.556)	617%
Penambahan utang bank	3.215.062.499	13.053.079.718	(9.838.017.219)	-75%
Pembayaran utang lain-lain - Pihak ketiga	(622.394.046)	(1.032.168.257)	409.774.211	-40%
Penambahan utang lain-lain - Pihak berelasi	20.000.000	-	20.000.000	#DIV/0!
Pembayaran utang lain-lain - Pihak berelasi	(2.491.000.000)	-	(2.491.000.000)	#DIV/0!
Pembayaran utang lembaga keuangan	101.155.101	161.614.165	(60.459.064)	-37%
Penambahan modal disetor	(1.053.709.403)	-	(1.053.709.403)	#DIV/0!
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(6.271.102.553)	9.930.392.457	(16.201.495.010)	-163%
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA K/	(5.023.098.683)	(18.715.048.237)	13.691.949.554	-73%
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5.134.673.575	41.294.212.198	(36.159.538.623)	-88%
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	111.574.892	22.579.163.961	(22.467.589.069)	-100%

d. Rasio Keuangan Penting

31/09/2025

Profitabilitas				
Return On Asset (ROA)	$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Asset}}$	$= \frac{-Rp \ 31.586.821.936,57}{Rp \ 266.090.727.668,60}$	$\times 100\% =$	-0,12
Return On Equity (ROE)	$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Equity}}$	$= \frac{-Rp \ 31.586.821.936,57}{Rp \ 188.161.224.344,20}$	$\times 100\% =$	-0,17
Net Profit Margin	$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}}$	$= \frac{-Rp \ 31.586.821.936,57}{Rp \ 59.389.114.593,00}$	$\times 100\% =$	-0,53

Likuiditas

Current Ratio	$\frac{\text{Asett Lancar}}{\text{Penjualan}}$	$= \frac{Rp \ 135.021.627.497,44}{-Rp \ 59.389.114.593,00}$	$\times 100\% =$	-2,27
---------------	--	---	------------------	-------

Leverage

Debt To Equity	$\frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Ekuitas}}$	$= \frac{Rp \ 77.929.503.324,48}{Rp \ 188.161.224.344,20}$	$\times 100\% =$	0,41
Debt to Asset	$\frac{\text{Total Liability}}{\text{TotL Aset}}$	$= \frac{Rp \ 77.929.503.324,48}{Rp \ 266.090.727.668,60}$	$\times 100\% =$	0,29

III. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan

1. Identitas Penilai dan Laporan Studi Kelayakan

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") **Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan (KJPP YDR)** sebagai penilai independen untuk menyusun Laporan Studi Kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

KJPP YDR memiliki Nomor Izin Usaha **2.16.0138** dan terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan Penilai yang bertanggung jawab atas laporan tersebut adalah:

Nama	: Ir. Mahrani, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)
No. Izin Penilai Publik	: B-1.15.00423
No. MAPPI	: 98-S-01056
No. STTD OJK (Pasar Modal)	: STTD.PB-40/PM.02/2023
No. STTD OJK (IKNB)	: 342/PD.021/STTD-P/2025
Kualifikasi Izin	: Penilai Bisnis

Laporan Studi Kelayakan diterbitkan dengan:

Nomor Laporan	: 00002/2.0138-00/JL/10/0370/1/II/2026
Tanggal Laporan	: 10 Februari 2026

2. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan **pendapat kelayakan** atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Kegiatan Usaha melalui penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam kaitannya dengan kepentingan pasar modal. Laporan ini tidak digunakan di luar konteks atau tujuan penugasan tersebut.

Studi kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan dari berbagai aspek, yaitu:

Analisis kelayakan pasar;
Analisis kelayakan teknis;
Analisis kelayakan pola bisnis;
Analisis kelayakan model manajemen; dan
Analisis kelayakan keuangan;

yang selanjutnya menjadi dasar bagi penilai dalam memberikan pendapat atas kelayakan rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

3. Objek Studi Kelayakan

Objek Studi Kelayakan adalah rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berupa:

- **KBLI 35132 – Penyimpanan Tenaga Listrik**, berupa Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU); dan
- **KBLI 35133 – Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik**, berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

4. Tanggal Efektif Studi Kelayakan

Tanggal efektif Studi Kelayakan adalah **30 September 2025**. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 17/POJK.04/2020, masa berlaku Studi Kelayakan adalah selama 6 (enam) bulan sejak tanggal analisis dalam Studi Kelayakan.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan, KJPP YDR menggunakan asumsi dan kondisi pembatas antara lain sebagai berikut:

- Laporan Studi Kelayakan bersifat **non-disclaimer opinion**.
- Penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan oleh manajemen Perseroan serta data yang tersedia untuk publik dan sumber lainnya yang dianggap relevan.
- Penilai tidak melakukan audit atau verifikasi independen atas informasi yang diberikan.
- Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran dengan mempertimbangkan kemampuan pencapaiannya.
- Laporan ini disusun untuk kepentingan pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku.
- Studi Kelayakan dilakukan berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020, Standar Penilaian Indonesia (SPI), dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

6. Pendekatan dan Metode Analisis yang Digunakan

Metodologi yang digunakan dalam Studi Kelayakan meliputi:

a. Pengumpulan Data

- Data primer melalui wawancara dan investigasi lapangan;
- Data sekunder berupa data makro ekonomi, industri, dan data pendukung lainnya.

b. Proses Analisis Kelayakan

• Analisis Kelayakan Pasar

Meliputi analisis kondisi pasar, pangsa pasar, kesinambungan usaha, potensi pasar, pesaing usaha, dan strategi pemasaran. Berdasarkan analisis tersebut, Penambahan Kegiatan Usaha dinilai memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan dinyatakan layak dari aspek pasar.

• Analisis Kelayakan Teknis

Meliputi analisis ketersediaan dan kualitas sumber daya, kesiapan operasional, spesifikasi teknis fasilitas SPKLU dan SPBKLU, serta rencana kemitraan strategis. Berdasarkan evaluasi tersebut, rencana Penambahan Kegiatan Usaha dinyatakan layak secara teknis.

• Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Meliputi analisis keunggulan kompetitif Perseroan, sinergi dengan bisnis eksisting, kemampuan menciptakan nilai tambah, serta strategi mitigasi risiko. Berdasarkan analisis tersebut, model bisnis dinilai berkelanjutan dan layak.

• Analisis Kelayakan Model Manajemen

Meliputi analisis ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, struktur organisasi, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan analisis tersebut, aspek manajemen dinyatakan memadai dan layak.

• Analisis Kelayakan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis proyeksi keuangan atas Penambahan Kegiatan Usaha diperoleh indikator sebagai berikut:

- **Net Present Value (NPV):** Rp357.492.074.033 (positif)
- **Internal Rate of Return (IRR):** 48,907%
- **Profitability Index (PI):** 5,51
- **Payback Period:** 3 Tahun 11 Bulan

Dengan NPV positif, IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan, serta PI lebih besar dari 1 (satu), maka Penambahan Kegiatan Usaha dinyatakan layak secara finansial.

7. Pendapat atas Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan kajian, evaluasi, Analisis kelayakan pasar, Analisis kelayakan teknis, Analisis kelayakan pola bisnis, Analisis kelayakan model manajemen, dan Analisis kelayakan keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah layak.

Kesimpulan tersebut berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Studi Kelayakan.

IV. Ketersediaan Tenaga Ahli Terkait Perubahan Kegiatan Usaha:

1. Penyesuaian Substansi Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan Studi Kelayakan pada aspek Model Manajemen, Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang memadai dan berpengalaman di bidang teknologi informasi dan sistem transportasi. Penambahan kegiatan usaha KBLI 35132 (SPBKLU) dan KBLI 35133 (SPKLU) dinilai layak dari aspek organisasi dan pengelolaan SDM, dengan pendekatan optimalisasi kapasitas internal serta penguatan fungsi lintas unit untuk mendukung operasional kegiatan usaha baru.

2. Jumlah Tenaga Kerja, Kualifikasi, dan Struktur Organisasi

Per 30 September 2025, Perseroan memiliki 51 karyawan. Untuk mendukung penambahan kegiatan usaha, Perseroan akan:

- a. Mengalokasikan tenaga kerja internal (tenaga ahli IT, operasional, sales & marketing, serta finance & accounting) sesuai kebutuhan dan kompleksitas proyek;
- b. Melakukan perekrutan SDM baru apabila diperlukan; dan/atau
- c. Menggunakan dukungan tenaga ahli bersertifikasi dari pihak ketiga.
- d. Struktur organisasi tetap berada di bawah pengawasan Direksi dengan penguatan fungsi teknis operasional SPBKLU dan SPKLU, yang terintegrasi dengan unit bisnis eksisting Perseroan.

3. Pelatihan dan Sertifikasi

- a. Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan program pelatihan internal yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan soft skills karyawan.
- b. Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha baru, pemenuhan kompetensi dilakukan melalui:
 - Kepemilikan sertifikasi oleh karyawan internal;
 - Pelatihan tambahan sesuai kebutuhan teknis ketenagalistrikan dan operasional SPKLU/SPBKLU; dan/atau

- Dukungan tenaga ahli bersertifikasi dari pihak ketiga sesuai regulasi yang berlaku

4. Tenaga Ahli Profesional dan Status Kepegawaian

Perseroan dapat menunjuk tenaga ahli profesional sesuai kebutuhan kegiatan usaha baru, baik dalam status:

- Karyawan tetap Perseroan;
- Karyawan kontrak/rekrutmen baru; maupun
- Konsultan/tenaga ahli independen dari pihak ketiga (misalnya untuk aspek teknis kelistrikan, sertifikasi, dan kepatuhan regulasi).
- Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar keselamatan, serta efektivitas operasional kegiatan usaha SPBKLU dan SPKLU.

V. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

1. Uraian Singkat Penambahan Kegiatan Usaha

Perseroan berencana menambah kegiatan usaha melalui penambahan KBLI 35132 (Penyimpanan Tenaga Listrik – SPBKLU) dan KBLI 35133 (Pengoperasian Fasilitas/Stasiun Pengisian Daya – SPKLU).

Penambahan ini merupakan kegiatan usaha penunjang yang masih memiliki sinergi dengan kegiatan usaha utama Perseroan di bidang solusi sistem transportasi berbasis IT, IoT, dan Intelligent Transport System (ITS). Infrastruktur SPKLU dan SPBKLU akan terintegrasi dengan ekosistem transportasi dan pelanggan eksisting Perseroan, khususnya operator transportasi publik dan fleet management.

2. Tujuan Penambahan Kegiatan Usaha

Tujuan penambahan kegiatan usaha adalah:

- Memperluas portofolio usaha dan menciptakan sumber pendapatan baru (recurring revenue).
- Memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia solusi transportasi terintegrasi berbasis teknologi.
- Meningkatkan daya saing melalui integrasi infrastruktur pengisian kendaraan listrik dengan sistem manajemen armada yang telah dimiliki.
- Menciptakan keunggulan kompetitif melalui sinergi teknologi, jaringan klien eksisting, dan pengembangan energy hub berbasis digital.

Dengan demikian, penambahan kegiatan usaha diharapkan meningkatkan nilai tambah dan kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan .

3. Kondisi Pasar Global, Domestik, dan Kebijakan Pemerintah

Secara global, tren transisi energi dan elektrifikasi sektor transportasi terus meningkat seiring komitmen pengurangan emisi karbon.

Secara domestik, Pemerintah Indonesia menunjukkan dukungan kuat melalui:

- Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang percepatan kendaraan listrik berbasis baterai;
- Permen ESDM terkait penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik;
- Insentif fiskal dan nonfiskal bagi kendaraan listrik dan industri pendukungnya.

Pertumbuhan kendaraan listrik dan dukungan regulasi tersebut menciptakan peluang signifikan bagi pengembangan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU, sehingga menjadi dasar pertimbangan Perseroan dalam melakukan penambahan kegiatan usaha .

4. Rencana Sumber Pendanaan dan Estimasi Kebutuhan Dana

Berdasarkan proyeksi dalam Studi Kelayakan, estimasi kebutuhan investasi (capital expenditure) untuk penambahan kegiatan usaha sekitar Rp75,55 miliar.

Sumber pendanaan direncanakan berasal dari kombinasi kas internal dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis kelayakan menunjukkan proyek layak secara finansial dengan NPV positif dan IRR di atas tingkat diskonto yang ditetapkan .

5. Strategi dan Rencana Bisnis serta Estimasi Pelaksanaan

Strategi Perseroan meliputi:

- Pengembangan SPBKLU dengan skema Battery as a Service (BaaS);
- Pengembangan SPKLU dengan spesifikasi DC Fast Charging;
- Sinergi dengan mitra strategis, termasuk kerja sama dengan PLN;
- Diversifikasi model pendapatan (subscription fee, surcharge fee, advertising, data services dan lain-lain).

Estimasi pelaksanaan kegiatan usaha dimulai setelah memperoleh persetujuan RUPSLB dan pemenuhan seluruh perizinan yang diperlukan .

6. Profil Singkat Perseroan dan Kesiapan Menjalankan Usaha Baru

Secara posisi pasar, Perseroan berada pada segmen solusi transportasi digital dan memiliki basis klien eksisting yang menjadi kekuatan strategis dalam pengembangan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU.

Dari sisi kapasitas dan sumber daya, Perseroan didukung manajemen berpengalaman serta 51 karyawan per 30 September 2025, dengan kompetensi di bidang IT, operasional, dan keuangan. Pemenuhan kebutuhan kompetensi dilakukan melalui optimalisasi SDM internal, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan tenaga ahli profesional apabila diperlukan

Model bisnis Perseroan berbasis solusi terintegrasi dengan potensi pendapatan berulang (recurring revenue). Penambahan kegiatan usaha memiliki sinergi langsung dengan bisnis eksisting, sehingga mendukung kesiapan dan keberlanjutan ekspansi usaha.

7. Perizinan yang Dibutuhkan dan Komitmen Perseroan

Dalam rangka pengembangan SPKLU dan SPBKLU, Perseroan memerlukan perizinan sesuai ketentuan sektor ketenagalistrikan dan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk:

- Penyesuaian Anggaran Dasar (penambahan KBLI);
- Perizinan usaha ketenagalistrikan dan infrastruktur pengisian;
- Persetujuan teknis dan standar keselamatan;
- Perizinan lokasi dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Perseroan berkomitmen untuk mengurus dan memenuhi seluruh perizinan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum operasional dimulai.

VI. Penjelasan Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha terhadap Posisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Studi Kelayakan, penambahan kegiatan usaha KBLI 35132 (SPBKLU) dan KBLI 35133 (SPKLU) memerlukan kebutuhan investasi awal (capital expenditure) sebesar ±Rp75,55 miliar, yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan. Selain itu, terdapat kebutuhan modal kerja yang tercermin dalam proyeksi perubahan modal kerja bersih pada periode awal operasional.

Secara kuantitatif, berdasarkan proyeksi keuangan incremental:

- Total investasi awal tercermin pada belanja modal sebesar Rp75,55 miliar.
- Proyek menghasilkan Net Present Value (NPV) positif sebesar ±Rp357,49 miliar.
- Internal Rate of Return (IRR) sebesar 48,907%, di atas tingkat diskonto 8,99%.
- Payback Period sekitar 3 tahun 11 bulan

Dari sisi kinerja keuangan, setelah operasional berjalan, proyek diproyeksikan meningkatkan pendapatan dan laba bersih secara bertahap, sehingga berdampak positif terhadap total aset, ekuitas, dan arus kas Perseroan dalam jangka menengah dan panjang.

VII. Hal Material Lainnya yang Berkaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha

1. RUPSLB dan Perubahan Anggaran Dasar

Penambahan kegiatan usaha KBLI 35132 (SPBKLU) dan KBLI 35133 (SPKLU) akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Persetujuan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan KBLI. Dengan demikian, RUPSLB dan Perubahan Anggaran Dasar merupakan dua tindakan korporasi yang disajikan dan diungkapkan secara terpisah, dimana perubahan Anggaran Dasar merupakan tindak lanjut dari persetujuan RUPSLB.

2. Studi Kelayakan oleh Penilai Independen

Sebagai pemenuhan POJK No. 17/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan, untuk menyusun Studi Kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha.

Studi kelayakan tersebut mencakup analisis aspek pasar, teknis, pola bisnis, model manajemen, dan keuangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, rencana penambahan kegiatan usaha dinyatakan layak dengan indikator keuangan antara lain NPV positif, IRR di atas tingkat diskonto, serta Payback Period dalam jangka waktu wajar

3. Kepatuhan Regulasi

Rencana penambahan kegiatan usaha dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pengungkapan terkait kepatuhan regulasi telah disampaikan pada bagian awal Keterbukaan Informasi. Selanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi seluruh ketentuan regulasi yang relevan, termasuk perizinan sektor ketenagalistrikan dan perubahan Anggaran Dasar sebelum operasional dimulai.

4. Risiko Usaha dan Langkah Mitigasi

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, terdapat beberapa risiko material sebagai berikut:

a. Risiko Regulasi

Perubahan kebijakan pemerintah, perizinan, dan standar ketenagalistrikan dapat mempengaruhi operasional.

Mitigasi: Perseroan berkomitmen mematuhi seluruh regulasi, melakukan koordinasi dengan regulator, serta memastikan pemenuhan standar keselamatan dan teknis yang berlaku.

b. Risiko Teknologi dan Infrastruktur

Perkembangan teknologi pengisian cepat (ultra-fast charging), kompatibilitas baterai, dan standar teknis dapat mempengaruhi model bisnis.

Mitigasi: Pengembangan desain modular, diversifikasi model bisnis (SPKLU dan SPBKLU dalam satu lokasi/energy hub), serta kerja sama strategis dengan mitra industri

c. Risiko Tingkat Utilisasi

Utilisasi SPKLU/SPBKLU dapat lebih rendah dari proyeksi apabila pertumbuhan kendaraan listrik tidak sesuai ekspektasi.

Mitigasi: Fokus pada segmen B2B dan pelanggan eksisting (fleet dan transportasi publik), penerapan skema subscription/BaaS, serta diversifikasi pendapatan (advertising, data services, dll.)

d. Risiko Pengembalian Investasi

Risiko tidak tercapainya proyeksi pendapatan dan laba yang berdampak pada pengembalian investasi.

Mitigasi: Analisis sensitivitas telah dilakukan dalam studi kelayakan; proyek masih layak dalam batas penurunan pendapatan dan kenaikan beban tertentu, sehingga risiko dapat dikelola secara terukur

VIII. Informasi Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

a. Pendahuluan

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan berupa KBLI 35132 (Penyimpanan Tenaga Listrik – SPBKLU) dan KBLI 35133 (Pengoperasian Fasilitas/Stasiun Pengisian Daya – SPKLU), yang merupakan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dianalisis dalam Studi Kelayakan oleh Penilai Independen.

Perseroan perlu melakukan perubahan terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, perubahan tersebut wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

b. Dasar Pelaksanaan RUPSLB

Pelaksanaan RUPSLB mengacu pada:

- Anggaran Dasar Perseroan;
- POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;
- POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik; Serta
- Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal dan perseroan terbatas.

c. Jadwal Pelaksanaan RUPSLB

Rencana jadwal pelaksanaan RUPSLB disajikan dalam tabel berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman RUPSLB	08 Januari 2026
2	Keterbukaan Informasi atas rencana penambahan kegiatan usaha	08 Januari 2026
3	Recording Date RUPSLB	22 Januari 2026
4	Pemanggilan RUPSLB	23 Januari 2026
5	Pelaksanaan RUPSLB	18 Februari 2026
6	Ringkasan Risalah RUPSLB	20 Februari 2026
7	Risalah RUPSLB	22 Maret 2026

d. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan

Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

• Kuorum Kehadiran

Untuk perubahan anggaran dasar sehubungan dengan untuk penambahan kegiatan usaha, RUPSLB sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

• Kuorum Pengambilan Keputusan

Untuk perubahan anggaran dasar sehubungan dengan untuk penambahan kegiatan usaha, keputusan RUPSLB sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka:

- Dapat dilakukan RUPS kedua sesuai ketentuan POJK dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Apabila pada RUPS kedua masih tidak tercapai kuorum, maka dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

IX. Informasi Tambahan

Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu:

Wendy Jolanda Waas (Corporate Secretary)

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Kantor Pusat

Gedung TKDN, Tbk

Jl. Sunter Muara No. 8A

Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok

Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14350

Telp. : 021 38889045

Website : www.tkdn.co.id

Email : corporate.secretary@tkdn.co.id

X. Ketentuan Apabila Tidak Memperoleh Persetujuan RUPS

Sesuai dengan Pasal 26 POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dalam hal perubahan Kegiatan Usaha tidak memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka rencana perubahan Kegiatan Usaha tersebut baru dapat dimintakan persetujuan kembali melalui RUPS paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui perubahan Kegiatan Usaha dimaksud.

Demikian Keterbukaan Informasi ini Perseroan sampaikan.

Jakarta, 12 Februari 2026

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk



Rudy Budiman Setiawan

Direktur